

## Problematika dan Solusi Dalam Moderasi Beragama

**Asep Saepul Rochman**

Sekolah Tinggi Agama Islam Kharisma Cicurug, Indonesia

Abeharef08@gmail.com

### Abstract

Religious moderation is a focus in dealing with the complexity of religion in modern society. The concept seeks to maintain justice and truth in religious practice. However, a number of challenges hinder the implementation of religious moderation, including extremism, discrimination, and the detrimental impact of social media and propaganda. Proposed solutions involve education that promotes a better understanding of religion, open interfaith dialog, and strict regulation of social media. However, each solution faces challenges and implications that need to be considered. A balance between free speech and protection from harmful content is key in promoting inclusive religious moderation.

**Keywords:** Education, Moderation, Religion

### Abstrak

Moderasi beragama menjadi fokus dalam menghadapi kompleksitas agama dalam masyarakat modern. Konsep ini berupaya untuk menjaga keadilan dan kebenaran dalam praktik keagamaan. Namun, sejumlah tantangan menghambat implementasi moderasi beragama, termasuk ekstremisme, diskriminasi, dan dampak buruk media sosial dan propaganda. Solusi yang diusulkan melibatkan pendidikan yang mempromosikan pemahaman agama yang lebih baik, dialog antaragama yang terbuka, dan regulasi yang ketat terhadap media sosial. Namun, setiap solusi menghadapi tantangan dan implikasi yang perlu dipertimbangkan. Keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan dari konten yang berbahaya adalah kunci dalam mempromosikan moderasi beragama yang inklusif.

**Kata kunci:** agama, moderasi, Pendidikan

## I. PENDAHULUAN

Moderasi beragama merupakan sebuah konsep yang muncul sebagai jawaban atas kompleksitas dunia modern yang dihuni oleh berbagai kelompok agama dan kepercayaan. Konsep moderasi beragama perlu diterapkan di berbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan (Isnaniah & Islahuddin, 2022). Moderasi beragama dibangun di atas dua konsep dasar yang menjadi fondasi bagi aktivitas dan perilaku

beragama. Sebagai titik tolak, keadilan adalah sikap dan perilaku yang tidak pernah berat sebelah atau memihak, selalu berpihak pada kebenaran, menempatkan sesuatu pada konteksnya yang tepat, dan memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya; dengan nada yang sama, moderasi beragama adalah sikap dan perilaku yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran dalam kehidupan beragama (Jamaludin, 2022).

Hal ini memberikan penjelasan dasar tentang konsep moderasi beragama, yang merupakan metode untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam praktik keagamaan. Ada dua konsep dasar yang menjadi landasan bagi moderasi beragama. Pertama, keadilan berarti bertindak dan bersikap dengan cara yang adil dan seimbang. Keadilan berarti tidak memihak dan selalu bertindak sesuai dengan kebenaran dalam konteks agama. Ini juga berarti tidak ada pihak yang diberi perlakuan lebih baik atau lebih buruk daripada yang lain. Kedua, ide utama moderasi beragama adalah kebenaran. Ini menekankan betapa pentingnya untuk menerapkan prinsip dan nilai yang tepat dan sesuai dalam kehidupan beragama. Moderasi religius mendukung.

Oleh karena itu, moderasi beragama adalah pendekatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa praktik dan perilaku beragama selalu berlandaskan pada keadilan dan kebenaran dan tidak memihak atau menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Hal ini penting untuk mendorong dialog antaragama yang sehat dan harmonis serta menghindari konflik yang mungkin timbul akibat intoleransi atau ekstremisme. Dalam bagian ini, konsep dasar dijelaskan. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim di mana setiap orang dan kelompok merasa dihormati dan diakui tanpa harus mengorbankan agama atau kepercayaan mereka. Moderasi beragama secara esensial berusaha mengurangi konflik antarumat beragama dengan mengedepankan prinsip komunikasi, toleransi, dan pemahaman. Ruang untuk berbagi ide dan perspektif antarumat beragama menjadi semakin penting di era globalisasi dan komunikasi yang cepat.

Konsep ini dapat membantu perdamaian dan kerukunan antarumat beragama, tetapi kenyataannya tidak selalu seperti yang diharapkan. Banyak negara dan masyarakat di seluruh dunia menghadapi sejumlah masalah yang menghambat penerapan moderasi beragama. Kendala-kendala ini, yang seringkali berakar dalam sejarah, budaya, dan geopolitik, menjadi tantangan yang signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran.

Tujuan moderasi beragama adalah untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang dan kelompok merasa dihormati dan dihargai tanpa mengorbankan agama atau keyakinan mereka. Untuk mengurangi ketegangan antar umat beragama, terutama di era globalisasi dan kecepatan komunikasi saat ini, moderasi agama mendorong prinsip-prinsip dialog, toleransi, dan saling pengertian. Namun, penerapan moderasi beragama menghadapi tantangan besar di banyak tempat di seluruh dunia, yang seringkali

disebabkan oleh sejarah, budaya, dan geopolitik. Berikut adalah beberapa masalah utama terkait moderasi beragama dan solusinya:

## II. Problematika Moderasi Beragama

### A. Ekstremisme dan Radikalisasi

Salah satu problematika utama dalam konteks moderasi beragama adalah ekstremisme dan radikalisasi yang terjadi di kalangan beberapa individu atau kelompok. Radikalisasi dan ekstremisme agama dapat menghambat upaya moderasi beragama, karena kelompok-kelompok ini mungkin tidak bersedia berpartisipasi dalam dialog damai atau tidak menerima pandangan lain yang berbeda. Beberapa penelitian telah mengeksplorasi peran moderasi beragama dalam mencegah ekstremisme dan radikalisme. Sebagai contoh, sebuah studi tentang Muslimat NU Dusun Durek di Kota Batu menemukan bahwa upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama, seperti keseimbangan, toleransi, dan musyawarah, dapat membantu mencegah ekstremisme agama (Rohmawati & Barizi, 2021).

Dalam uraian di atas, disebutkan bahwa beberapa penelitian telah menyelidiki peran moderasi beragama dalam menghentikan ekstremisme dan radikalisme. Sebagai contoh, penelitian ini melihat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Dusun Durek, Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama, seperti keseimbangan, toleransi, dan musyawarah, dapat membantu mencegah ekstremisme agama. Dalam konteks ini, moderasi beragama adalah praktik keagamaan yang berfokus pada nilai-nilai seperti keseimbangan, toleransi, dan musyawarah, yang mencegah ekstremisme dan radikalisme.

Muslimat Nahdlatul Ulama adalah istilah yang mengacu pada organisasi perempuan yang terkait dengan Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi Islam utama di Indonesia. Bagaimana kelompok ini mengadopsi upaya moderasi beragama dapat diidentifikasi melalui penelitian ini. Studi tersebut dilakukan di Dusun Durek, Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan moderasi beragama dalam praktik beragama, yang mencakup nilai-nilai seperti toleransi dan keseimbangan, dapat membantu mencegah munculnya ekstremisme agama. Penelitian ini juga menekankan betapa pentingnya pendekatan yang lebih moderat dalam agama untuk mendorong toleransi, diskusi, dan pemahaman yang lebih baik satu sama lain, serta untuk mencegah konflik dan radikalisasi yang mungkin terjadi.

### B. Ketidaksetaraan dan Diskriminasi

Ketidaksetaraan dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan masih merupakan masalah serius di banyak negara. Ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik antarumat beragama, sehingga mempersulit upaya moderasi. Makalah ini

mengeksplorasi hubungan antara diskriminasi agama terhadap kelompok etnis dan hubungan krisis kebijakan luar negeri. Studi ini menguji apakah negara-negara yang ditandai dengan tingkat diskriminasi agama yang tinggi terhadap etnis minoritas lebih mungkin untuk memulai atau terlibat dalam krisis kebijakan luar negeri dengan negara-negara lain secara umum. Hasilnya menunjukkan bahwa diskriminasi agama merupakan prediktor penting untuk memulai dan terlibat dalam krisis internasional (Özdamar & Akbaba, 2014). Uraian ini merujuk pada sebuah studi yang menguji hubungan antara tingkat diskriminasi agama terhadap etnis minoritas di suatu negara dengan kemungkinan negara tersebut terlibat dalam krisis kebijakan luar negeri dengan negara-negara lain. Hasil dari studi tersebut menunjukkan bahwa tingkat diskriminasi agama adalah faktor penting yang dapat memprediksi kemungkinan suatu negara memulai atau terlibat dalam krisis internasional.

Artinya, studi ini menemukan bahwa negara-negara yang memiliki tingkat diskriminasi agama yang tinggi terhadap etnis minoritas cenderung lebih mungkin terlibat dalam konflik atau krisis di bidang kebijakan luar negeri dengan negara-negara lain. Diskriminasi agama di dalam negeri dapat menjadi salah satu pendorong untuk tindakan agresif atau konfrontasi dalam hubungan internasional. Studi tersebut menyoroti pentingnya faktor-faktor seperti diskriminasi agama dalam menganalisis perilaku dan kebijakan luar negeri suatu negara.

### C. Media Sosial dan Propaganda

Penggunaan media sosial dan propaganda oleh kelompok ekstrem dan radikal telah menjadi sumber penyebaran pesan yang merugikan moderasi beragama. Informasi palsu, retorika kebencian, dan pemilihan berita yang bias dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan menghambat upaya untuk mempromosikan dialog antarumat beragama. Penggunaan media sosial dan propaganda oleh kelompok-kelompok ekstrem dan radikal telah menjadi sumber penyebaran pesan-pesan yang merugikan moderasi beragama. Informasi yang salah, retorika kebencian, dan pemilihan berita yang bias dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan menghambat upaya untuk mempromosikan dialog antar agama. Masalah konten berbahaya di platform media sosial sangat kompleks dan tunduk pada subjektivitas dan kompleksitas dalam memoderasi konten online (Meggyesfalvi, 2021).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dampak penggunaan media sosial dan propaganda oleh kelompok-kelompok ekstrem dan radikal terhadap moderasi beragama. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam upaya mempromosikan moderasi beragama dalam dunia digital saat ini. Poin utamanya adalah sebagai berikut. Pertama bahwa penyebaran pesan merugikan moderasi beragama. Kelompok ekstrem dan radikal menggunakan media sosial dan propaganda untuk menyebarkan pesan-

pesan yang bertentangan dengan nilai-nilai moderasi beragama. Ini bisa mencakup informasi yang salah, retorika kebencian, dan pemilihan berita yang bias.

Kedua, pengaruh terhadap persepsi masyarakat. Pesan-pesan yang merugikan ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Masyarakat yang terpapar terus-menerus dengan konten ekstrem dapat mengembangkan pandangan yang lebih radikal, yang menghambat upaya untuk mempromosikan dialog antar agama dan toleransi. Ketiga, kompleksitas dalam moderasi konten online. Hal ini juga menggaris bawahi kompleksitas dalam memoderasi konten berbahaya di platform media sosial. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh penyedia platform dan regulator dalam mengidentifikasi dan menghapus konten ekstrem dan berbahaya.

Dalam konteks ini, moderasi beragama memerlukan upaya yang lebih besar dalam melawan penyebaran pesan ekstremisme dan radikalisme di media sosial. Perlu ada kesadaran tentang dampak negatif dari informasi yang salah dan retorika kebencian serta langkah-langkah untuk memitigasi pengaruhnya. Selain itu, perlu ada upaya yang lebih baik dalam mengembangkan algoritma dan kebijakan yang dapat membantu memoderasi konten berbahaya secara efektif di lingkungan digital yang sangat kompleks.

### III. Tawaran Solusi

#### A. Pendidikan dan Kesadaran

Pendidikan adalah kunci dalam mengatasi problematika moderasi beragama. Pendidikan yang mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang agama dan kepercayaan yang berbeda, serta nilai-nilai toleransi, dapat membantu mencegah radikalisasi dan ekstremisme. Program pendidikan dan kesadaran yang efektif dapat melibatkan kelompok agama, masyarakat sipil, dan pemerintah. Sebuah penelitian yang dilakukan di Indonesia menemukan bahwa Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dapat menciptakan pemahaman keagamaan yang moderat pada penghuni TPA, atau paling tidak, dapat memperkuat moderasi beragama (Nabhani et al., 2023). Hal tersebut menggambarkan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa TPA memiliki dampak positif dalam menciptakan pemahaman keagamaan yang moderat pada penghuninya. Dengan kata lain, peserta atau siswa yang mengikuti program di TPA cenderung memiliki pemahaman agama yang lebih moderat, yang artinya mereka cenderung memiliki pandangan yang seimbang dan toleran dalam beragama.

Selain itu juga mengungkapkan bahwa, setidaknya, TPA dapat memperkuat moderasi beragama. Ini berarti bahwa TPA tidak hanya menciptakan pemahaman yang moderat pada pesertanya, tetapi juga dapat memperkuat sikap moderasi yang mungkin sudah ada pada peserta sebelum mengikuti program di TPA. Dalam konteks ini, moderasi beragama mengacu pada sikap yang mengedepankan pemahaman agama yang inklusif,

toleran terhadap pandangan dan keyakinan agama yang berbeda, serta menghindari ekstremisme atau sikap yang radikal dalam menjalani keyakinan agama. Sehingga, hasil penelitian ini menunjukkan peran positif TPA dalam mempromosikan pemahaman keagamaan yang seimbang dan moderat pada masyarakatnya.

## B. Dialog Antaragama

Fasilitasi dialog antaragama yang terbuka dan jujur adalah salah satu cara terbaik untuk mengatasi ketegangan antarumat beragama. Dialog ini dapat memungkinkan individu dari latar belakang agama yang berbeda untuk memahami pandangan dan kepentingan masing-masing. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan dapat memainkan peran penting dalam mendorong dialog ini. Pendidikan Agama Islam yang diajarkan kepada mahasiswa sebagai mata kuliah utama merupakan peluang untuk membentuk sikap moderasi beragama mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Upaya dosen PAI dalam membangun sikap moderasi beragama mahasiswa antara lain melalui pemahaman metodologi pengajaran agama Islam, substansi kurikulum PAI yang diarahkan pada karakter moderat, keteladanan dan sikap dosen PAI, ruang diskusi, program pembelajaran Al-Qur'an, pendampingan dan pembinaan unit kegiatan mahasiswa, dan evaluasi (Nabhani et al., 2023). Artinya upaya dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam membangun sikap moderasi beragama pada mahasiswa melibatkan berbagai aspek, dan berikut adalah beberapa diantaranya:

1. **Pemahaman Metodologi Pengajaran Agama Islam:** Dosen PAI dapat memastikan bahwa mereka menggunakan metodologi pengajaran yang mendukung pemahaman agama yang moderat. Ini termasuk pendekatan pembelajaran yang mempromosikan pemahaman yang inklusif, kritis, dan terbuka terhadap berbagai interpretasi agama.
2. **Substansi Kurikulum PAI yang Mendukung Karakter Moderat:** Dosen dapat memastikan bahwa kurikulum PAI yang mereka ajarkan memiliki substansi yang mengarahkan pada pengembangan karakter moderat. Ini mungkin melibatkan materi pembelajaran yang menekankan toleransi, dialog antaragama, dan pemahaman yang seimbang tentang prinsip-prinsip agama.
3. **Keteladanan dan Sikap Dosen PAI:** Dosen memiliki peran penting sebagai teladan bagi mahasiswa. Sikap dan perilaku dosen PAI yang moderat dan toleran dapat membentuk contoh yang baik bagi mahasiswa. Ketika dosen menunjukkan sikap moderasi dalam beragama, mahasiswa cenderung terinspirasi untuk mengikuti contoh tersebut.
4. **Ruang Diskusi:** Menciptakan ruang diskusi yang terbuka dan aman di kelas atau di luar kelas di mana mahasiswa dapat berbicara tentang isu-isu agama dan berbagi pandangan mereka adalah cara untuk membangun pemahaman dan sikap moderasi.

Dalam ruang diskusi ini, mahasiswa dapat mengemukakan pertanyaan, merinci pandangan mereka, dan mendengar sudut pandang yang beragam.

5. Program Pembelajaran Al-Qur'an: Program pembelajaran Al-Qur'an yang berfokus pada pemahaman yang benar dan kontekstual dari ayat-ayat Al-Qur'an dapat membantu mahasiswa menghindari penafsiran yang ekstrem atau radikal.

6. Pendampingan dan Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa: Dosen PAI dapat terlibat dalam mendampingi dan membimbing mahasiswa dalam unit kegiatan mahasiswa yang terkait dengan agama. Ini dapat membantu mahasiswa mempraktikkan nilai-nilai moderasi dalam aktivitas keagamaan mereka di luar kelas.

7. Evaluasi: Dosen PAI dapat menggunakan alat evaluasi yang tepat untuk mengukur pemahaman dan sikap mahasiswa terkait moderasi beragama. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki metode pengajaran dan pendekatan yang digunakan.

Melalui berbagai upaya ini, dosen PAI berperan penting dalam membentuk sikap moderasi beragama pada mahasiswa, sehingga mereka dapat memiliki pemahaman agama yang seimbang, toleran, dan inklusif.

### C. Regulasi Media Sosial

Regulasi yang lebih ketat terhadap media sosial dan propaganda ekstrem dapat membantu mengurangi penyebaran pesan yang merugikan moderasi beragama. Pemerintah dan perusahaan teknologi harus bekerja sama untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang merusak serta mempromosikan literasi media untuk membantu orang memahami dampak media sosial. Pemerintah dan perusahaan teknologi harus bekerja sama untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang merusak dari platform media sosial. Misalnya, Nigeria telah mengusulkan pendekatan formal yang diwakili oleh RUU Kebohongan Internet 2019, tetapi para pemangku kepentingan telah menyarankan alternatif seperti pengaturan mandiri platform, tata kelola yang dibangun di atas kepercayaan, dan literasi media digital (Obia, 2023).

Pernyataan tersebut menggambarkan perlunya kerjasama antara pemerintah dan perusahaan teknologi dalam mengatasi konten merusak di platform media sosial. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut: Pertama; Identifikasi dan Penghapusan Konten Merusak: Pemerintah dan perusahaan teknologi perlu bekerja sama untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang merusak, termasuk konten yang berpotensi menciptakan ketidakamanan, kebencian, hoaks, atau penyebaran berita palsu. Langkah ini penting untuk menjaga lingkungan online yang lebih aman dan sehat. Kedua; Contoh RUU Kebohongan Internet 2019 di Nige: RUU seperti ini merupakan upaya formal pemerintah untuk mengatur dan mengawasi aktivitas online, khususnya di media sosial. RUU semacam itu dapat mencakup ketentuan tentang penalti bagi penyebaran informasi

palsu, yang bertujuan untuk mencegah penyebaran konten merusak. Ketiga; Alternatif seperti Pengaturan Mandiri Platform: Selain regulasi pemerintah, alternatif lain adalah mendorong perusahaan teknologi untuk mengatur dan mengelola platform mereka secara mandiri. Ini termasuk pengawasan ketat terhadap konten yang diunggah oleh pengguna dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menghapus konten merusak. Keempat; Tata Kelola Berbasis Kepercayaan: Beberapa pihak berpendapat bahwa penting untuk membangun tata kelola platform yang didasarkan pada kepercayaan. Ini berarti mendorong perusahaan teknologi untuk memiliki pedoman yang ketat dan transparan terkait dengan konten yang diperbolehkan di platform mereka. Selain itu, mereka juga dapat melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Kelima; Literasi Media Digital: Selain upaya regulasi dan tata kelola, literasi media digital menjadi faktor penting. Pendidikan dan kesadaran publik tentang cara mengidentifikasi dan menghindari konten merusak dapat membantu individu menjadi lebih bijak dalam berinteraksi di media sosial.

Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan teknologi adalah penting dalam menemukan solusi yang seimbang dan efektif untuk mengatasi konten merusak di media sosial. Pendekatan yang komprehensif yang mencakup regulasi, pengaturan mandiri, tata kelola yang lebih baik, dan literasi media digital dapat membantu menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan positif bagi semua pengguna.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia adalah contoh lain dari regulasi yang bertujuan untuk mengurangi konten negatif di media sosial (Mulyadi & Gusfa, 2019).

Benar, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia adalah salah satu contoh regulasi yang bertujuan untuk mengatur dan mengurangi konten negatif di media sosial dan lingkungan digital secara lebih umum. UU ITE ini berfokus pada pengaturan aktivitas di ranah digital dan internet. Beberapa poin kunci dalam UU ITE yang relevan dengan isu konten negatif di media sosial termasuk:

1. Konten yang Dilarang: UU ITE menetapkan bahwa penggunaan internet dan media sosial tidak boleh digunakan untuk menyebarkan konten yang melanggar hukum, mengandung fitnah, penghinaan, atau konten negatif lainnya.
2. Pelanggaran Hak Privasi: UU ITE juga mengatur penggunaan informasi pribadi dan melarang penyebaran data pribadi tanpa izin pemiliknya, yang merupakan upaya untuk melindungi privasi individu.
3. Tindakan Kriminal dalam Dunia Maya: UU ITE mengatur berbagai tindakan kriminal dalam dunia maya, seperti penipuan, pencemaran nama baik, atau tindakan cyberbullying.



4. Pengawasan dan Penegakan Hukum: UU ITE memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengawasi dan menegakkan ketentuan yang ada, termasuk melalui upaya penegakan hukum.

Namun, UU ITE juga telah mendapatkan kritik karena dianggap dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berbicara dan menyuarakan pendapat di media sosial. Beberapa pengamat dan aktivis hak asasi manusia telah menyuarakan keprihatinan terkait penyalahgunaan hukum ini untuk menekan kritik terhadap pemerintah atau individu. Oleh karena itu, debat tentang perlunya reformasi dan revisi UU ITE telah menjadi perdebatan yang signifikan di Indonesia.

Regulasi semacam UU ITE mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi isu-isu yang muncul di dunia maya, termasuk konten negatif di media sosial, tetapi juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap individu dari konten merugikan atau ilegal.

#### IV. KESIMPULAN

Moderasi beragama merupakan konsep penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis di dunia yang penuh dengan keragaman agama dan kepercayaan. Konsep ini didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam praktik beragama. Namun, implementasi moderasi beragama dihadapi sejumlah problematika, termasuk ekstremisme dan radikalisme, ketidaksetaraan dan diskriminasi, serta penggunaan media sosial dan propaganda yang merusak. Tiga solusi yang diusulkan untuk mengatasi problematika moderasi beragama adalah:

1. Pendidikan yang mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang agama dan kepercayaan yang berbeda, serta nilai-nilai toleransi, dapat membantu mencegah radikalisme dan ekstremisme.
2. Fasilitasi dialog antaragama yang terbuka dan jujur adalah cara terbaik untuk mengatasi ketegangan antarumat beragama.
3. Regulasi yang lebih ketat terhadap media sosial dan propaganda ekstrem dapat membantu mengurangi penyebaran pesan yang merugikan moderasi beragama.

Namun, perlu diperhatikan bahwa setiap solusi juga memiliki tantangan dan implikasi yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Selain itu, penting untuk mencari keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan dari konten merugikan dalam upaya mempromosikan moderasi beragama.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Isnaniah, S., & Islahuddin, I. (2022). THE APPLICATION OF RELIGIOUS MODERATION CONCEPT IN INDONESIAN LANGUAGE TEACHING: A CASE STUDY IN ISLAMIC SCHOOLS AND ISLAMIC UNIVERSITIES (PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM/PTKI). *Penamas*, 35(2), 213–222. <https://doi.org/10.31330/penamas.v35i2.629>
- Jamaludin, A. N. (2022). Religious Moderation: The Concept and Practice in Higher Education Institutions. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 539–548. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1893>
- Meggyesfalvi, B. (2021). Policing harmful content on social media platforms. *Belügyi Szemle*, 69(6. ksz.), 26–38. <https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2021.6.2>
- Mulyadi, E., & Gusfa, H. (2019). The Regulation (ITE Law) Socialization and Implementation Model by Kominfo to Mitigate Negative Content on Social Media. *Proceedings of the First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)*. *Proceedings of the First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)*, Bandung, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.98>
- Nabhani, I., Ainissyifa, H., Nasrullah, Y. M., & Fatonah, N. (2023). Implementation of Religious Moderation Values in East Priangan Higher Education. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 6(1), 51–64. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v6i1.24700>
- Obia, V. A. (2023). MATRIX OF DEPENDENCE, POSTCOLONIALISM, AND SOCIAL MEDIA REGULATION IN AN AFRICAN CONTEXT. *AoIR Selected Papers of Internet Research*. <https://doi.org/10.5210/spir.v2022i0.13064>
- Özdamar, Ö., & Akbaba, Y. (2014). Religious Discrimination and International Crises: International Effects of Domestic Inequality. *Foreign Policy Analysis*, 10(4), 413–430. <https://doi.org/10.1111/fpa.12016>
- Rohmawati, Y., & Barizi, A. (2021). RELIGIOUS MODERATION IN THE RECITATION ACTIVITY OF MUSLIMAT NU: An Effort to Prevent Religious Extremism. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 22(2), 360–376. <https://doi.org/10.18860/ua.v22i2.14092>